

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 7 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | | | | |
|---------------|------------|-----------|-------------|--------------|
| Suara Merdeka | Jateng Pos | Jawa Pos | Koran Tempo | Wawasan |
| Tribun Jateng | Sindo | Republika | Kompas | Metro Jateng |

Wilayah Berita : Kabupaten Batang

Halaman 15

Pemkab Pelototi Duit PNPM Rp60 Miliar

BATANG (MJ) – Pemkab Batang akan terus memantau penggunaan dana sekitar Rp 60 Miliar yang dikelola pengurus Badan Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM).

DAPM ini bertugas mengelola uang negara eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) yang sudah berjalan 17 tahun.

"Pengelola diminta tetap eksis berjalan dan bisa mem-

pertanggungjawabkannya. Dana PNPM Perdesaan saat ini mencapai Rp mencapai Rp 3 M hingga Rp 6 milyar tiap kecamatan. Untuk tingkat Kabupaten mencapai Rp 60 M. Ini merupakan aset keuangan negara yang besar dan memiliki potensi ekonomi yang luar biasa, karena lembaga keuangan ini untuk membantu perekonomian masyarakat desa," ujar Kepala Bapermasdes Batang, Tulyono saat Silaturahmi

Asosiasi Badan Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat di Tirta Asri Desa Sempu Limpung, Rabu (5/7).

Untuk itu, dana tersebut harus bisa dipertang-



gung jawabkan, meskipun program PNPM perdesaan sudah berhenti. Selain itu, dana tersebut harus dilaporkan ke pemerintah pusat dan Pemkab melalui Badan Peme-

berdayaan Masyarakat Desa (BAPERMASDES).

Sehingga pengelola dana tidak terkena persoalan hukum.

Saat ini, dana PNPM itu bereubah nama menjadi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Sedangkan Wakil Bupati Batang Suyono menegaskan, sebagai pengelola uang negara agar tetap eksis harus ada inovasi dan kreativitas dengan melihat kemam-

puan modal keuangan untuk membantu perekonomian masyarakat.

"Selain itu, dalam bekerja kita juga harus berpegang pada dasar hukum dan aturannya lembaga ini akan langgeng dan besar serta tidak bermasalah hukum," kata Wakil Bupati Suyono di hadapan pengurus dan pengelola BKAD, UPK, BP-UPK, Tim Verifikasi Pengguliran dan Tim Pendanaan Kabupaten Batang. (dik/tyo)